

ROLE BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) IN BOARDING SCHOOL SIDOGIRI EMPOWERMENT AS ALTERNATIVE SMALL AND MEDIUM (MSMES)

Mohammad Imsin Al Mustofa
Dosen FIA Unipdu

Abstract

Baitul maal wattamwil (BMT) is a microfinance institution that uses the approach of Islamic patterns. The existence of BMT MMU in the midst of Muslim society / the students and the PondokPesantren Sidogiri is such an empowerment model of small and medium businesses which has been running since 17 July 1997. BMT MMU Sidogiri stands and operates based on the spirit of dedication and sense of community is concerned about the economic existence around the boarding school are entwined by the practice of money lenders, who became the attention and concern of the owner Boarding Schools and finally stood MMU SidogiriBMT. From this background emerged a few questions What is the role of Baitul Maal wattamwil (BMT) Sidogiri At boarding school in empowering small and medium enterprises (SMEs)?. the purpose of this study was to determine and analyze the role of Baitul Maalwattamwil (BMT) At boarding school in empowering business Sidogiri small-medium enterprises (MSMEs). BMT-MMU Sidogiri role in enhancing the empowerment of small and medium business is a real happening, and is one of the microfinance institution with a proper system of sharia to be made in alternative models to be developed in increasing empowerment of small and medium enterprises in the future. This can be seen from some indications that the number of member development, asset and his work, microfinance institutions such as BMT MMU Sidogiri.

Keywords: *baitul maal wattamwil (BMT), UMKM*

Abstrak

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan pendekatan pola Islam. Keberadaan BMT MMU di tengah-tengah masyarakat muslim / mahasiswa dan Sidogiri PondokPesantren adalah sebuah model pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang sudah berjalan sejak 17 Juli 1997. BMT MMU Sidogiri berdiri dan beroperasi berdasarkan semangat dedikasi dan rasa komunitas yang bersangkutan tentang keberadaan ekonomi di seluruh pondok pesantren yang terjalin oleh praktek rentenir, yang menjadi perhatian dan keprihatinan dari Sekolah pemilik Boarding dan akhirnya berdiri MMU SidogiriBMT. Dari latar belakang ini muncul beberapa pertanyaan Apa peran Baitul Maal wattamwil (BMT) Sidogiri Di sekolah asrama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM)?. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Baitul Maalwattamwil (BMT) Di sekolah asrama dalam memberdayakan usaha Sidogiri kecil menengah (UMKM). BMT-MMU Sidogiri peran dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah peristiwa nyata, dan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dengan sistem syariah yang tepat harus dibuat dalam model-model alternatif untuk dikembangkan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di masa depan. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi bahwa jumlah pengembangan anggota, aset dan karyanya, lembaga keuangan mikro seperti BMT MMU Sidogiri.

Kata kunci: *baitul maal wattamwil (BMT), UMKM*

A. Latar Belakang

Telah menjadi pengetahuan banyak pihak bahwa peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia begitu penting. Sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99%! Menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja (97%)! Menyumbang PDB sebesar Rp2.609 triliun (55,6%)! Serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%) (Bank Indonesia. 2010).

Dengan data perkembangan UMKM yang tadi telah diungkapkan, ditambah dengan kenyataan bahwa populasi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang merefleksikan pula kondisi populasi mayoritas dunia usaha di sektor UMKM, sepatutnya sistem perbankan syariah (BMT) bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut. Apalagi, diyakini praktek perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan nature dunia usaha sektor UMKM. Jika melihat kinerja pembiayaan perbankan syariah kontribusi itu pada dasarnya sudah jelas terlihat.

Sejauh ini dengan kekuatan 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 151 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.073 unit, perbankan syariah nasional telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM diakhir tahun 2010 telah mencapai Rp52,6 triliun atau porsinya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha. Pada akhir tahun 2010 itu, pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan syariah itu sendiri. Sementara jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari 600

ribu rekening atau porsinya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah.

Keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank syariah secara individu, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UKMM atau sentra UMKM. Berdasarkan data pembiayaan sektoralnya, saat ini pembiayaan UMKM perbankan syariah terkonsentrasi pada pembiayaan di sektor retail (31,1%), jasa usaha (29,3%) dan perdagangan (13,2%). Eksposur pembiayaan sektoral UMKM perbankan syariah identik atau sama dengan eksposur total pembiayaan industri.

Kinerja perbankan syariah diatas belum termasuk kontribusi 151 BPRS yang tersebar di 22 provinsi Indonesia. BPRS dengan karakteristik kapasitas yang relatif kecil dan spesifik melayani pelaku usaha di komunitas-komunitas kecil masyarakat, sudah tentu hampir seluruh kemampuan penyediaan pembiayaannya di salurkan pada sektor UMKM. Berdasarkan data pada akhir 2010 fungsi intermediasi BPRS bagi sektor UMKM tampak berjalan cukup optimal, hal ini ditunjukkan dengan angka FDR yang mencapai 128,5%. Meski pembiayaan bermasalah BPRS relatif lebih tinggi di dibandingkan kinerja BUS dan UUS yaitu sebesar 6,5%, namun dalam periode 3 tahun terakhir angka pembiayaan bermasalah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada skala usaha yang tidak jauh berbeda dan ruang lingkup pelayanan yang juga relatif sama, dalam melayani masyarakat UMKM, BPRS ditemani oleh lembaga keuangan non-bank syariah yang saat ini berkembang tidak kalah tingginya, yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan berbadan usaha koperasi yang kini dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang jumlahnya kini diperkirakan telah mencapai lebih dari 3000 unit.

Namun meski kontribusi perkembangannya cukup besar, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM relatif begitu kompleks, dari masalah SDM, akses modal,

budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Skema pembiayaan linkage yang dilakukan bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa channeling, executing atau joint financing. Skema channeling menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermedias BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema executing dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara itu, skema joint financing adalah skema dimana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Disamping itu, akhir-akhir ini terbentuk juga kerja sama bank-bank syariah dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang menghantui dunia UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Bank syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya

meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya bagi nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.

Dengan ruang-lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi domestik, tidak mengherankan sektor UMKM selalu tampil menjadi “pahlawan” bagi perekonomian negeri ini, ketika ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga kerap menghantam ekonomi global. Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Bagaimana dengan kontribusi industri perbankan syariah nasional khususnya baitul maal wattamwil (BMT) terhadap pertumbuhan sektor UMKM?

Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran perbankan syariah di sektor UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu memproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur (Bank Indonesia, 2010).

Dari gambaran langkah dan peran yang telah diambil di jajaran perbankan syariah

sebagaimana data tersebut diatas, ini termasuk didalamnya lembaga keuangan baitul maal wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam mengangkat pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah khususnya di kabupaten Pasuruan bahkan mulai menunjukkan perannya di propinsi Jawa timur melalui jaringan alumni yang tersebar di penjuru propinsi, yang sebagian besar menekuni wirausaha mandiri. Keadaan gambaran peningkatan dan peran lembaga keuangan yang dibawah kendali keluarga besar Pondok pesantren Sidogiri yang terdiri dari Kopontren ,BMT-MMU dan BMT- UGT dalam pemberdayaan UMKM terlihat pada pengkucuran dana ke sektor UMKM dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2005 s/d 2009 yang mencapai kurang lebih RP 150M pada tahun 2009. dan ini pasti berpengaruh juga terhadap peningkatan asset lembaga BMT pondok pesantren Sidogiri, ini tergambar pada tabel Tabel 1.

Berdirinya lembaga keuangan dengan pola syariah (BMT) di pondok pesantren Sidogiri dilatarbelakangi oleh komitmen pendirinya dan para penerusnya untuk peduli dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya ,yaitu masyarakat golongan ekonomi rendah atau pengusaha bersekala kecil dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan kredit dari sumber sumber keuangan informal seperti rentenir dan pengijon, yang dapat diperoleh dengan mudah, cepat, tepat namun dengan tingkat bunga yang tinggi. Karena tingginya bunga lembaga keuangan rentener tersebut , banyak usaha menengah dan kecil di sekitar pondok tidak dapat berkembng atau bahkan menjadi tidak layak karena tingginya beban modal pinjaman. Dari keadaan masyarakat yang agamis, lembaga keuangan mikro yang mampu menyentuh para pelaku usaha kecil serta semangat untuk peduli mengangkat dan mengurangi terhadap kondisi usaha kecil yang terlilit oleh rentener dengan bunga yang mencekik, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang *PERAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI*

PONDOK PESANTREN SIDOGIRI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UMKM).

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peranan Baitul maal wattamwil (BMT) Di pondok pesantren Sidogiri dalam memberdayakan usaha kecil menengah (UMKM) ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Baitul maal wattamwil (BMT) Di pondok pesantren Sidogiri dalam memberdayakan usaha kecil menengah (UMKM) ?

D. Kajian teori

a. Pengertian BMT

BMT (Baitul maal wattamwil) atau padanan balai usaha mandiri terpadu adalah, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (menyerupai koperasi). Yang secara konseptual BMT memiliki dua fungsi:

1. Bait maal (Bait = rumah, Maal = harta) Menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitul Tamwil (bait = rumah, attamwil = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil teruma dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT, kelompok usaha bersama yang fokus maju dan terus berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati – hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan kelompok usaha bersama dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati – hatian, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat damai dan sejahtera

Sedangkan tujuan BMT adalah mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat damai dan sejahtera.

b. Hakekat usaha kecil dan menengah

Istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha kecil menengah yang penggunaan istilah ekonomi rakyat memberikan kesan secara umum yang menggambarkan bahwa seolah-olah selama ini telah terjadi pembelahan (dikotomi) antara rakyat dan konglomerat . Melihat kecenderungan yang demikian, maka untuk memahami substansi yang sesungguhnya dari istilah tersebut diperlukan pengkajian secara memadai sehingga kesan yang bernada dikotomis rakyat versus konglomerat dapat dipahami secara baik pula.

Kata pemberdayaan dan memberdayakan yang merupakan terjemahan dari *empower* , kemunculan istilah ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah ketidakberdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat suatu berkemampuan atau berkekuatan (Depdikbud 1992). Dengan merujuk pada pengertian diatas, maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki rakyat.

Pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi *pertama*: pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi rakyat dapat berkembang. *Kedua* pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi dan lapangan kerja. *Ketiga* pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti berupaya melindungi atau

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang , serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang maju dengan yang belum maju (Beny. R. 1998).

E . Metode penelitian

Dari karakteritik masalah yang lebih bersifat kasuistik dan spesifik , metode penelitian yang di gunakan untuk menjawab dari beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mencari informasi faktual yang mendetail dan mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Dengan tujuan untuk membuat komparasi dan evaluasi, serta untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh lembaga keuangan mikro yang lain dalam menangani masalah pada situasi dan obyek yang sama, agar dapat belajar dari mereka sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan dan kepentingan untuk pembuatan usulan rekomendasi tentang alternatif pengembangan model lembaga keuangan mikro(BMT) sebagai lembaga keuangan yang dapat menyentuh dan peduli dengan usaha mikro ,kecil dan menengah UMKM. Penggalan datanya melalui observasi dan wawancara langsung, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis ke sumber data utama yang difokuskan pada pengurus / pengelola Kopontren, BMT MMU dan BMT-UGT pondok pesantren Sidogiri di desa Sidogiri Kraton Kabupaten Pasuruan.

F . Penelitian sebelumnya

Peran BMT dalam mengembangkan Usaha kecil menengah (UKM) cukup dirasakan manfaatnya. Studi yang dilakukan Nurul Widyaningrum (2002) terhadap BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor menunjukkan ada empat kelebihan BMT, yakni: adanya kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”. Berbeda dengan perbankan yang lebih mengutamakan nasabah ‘kakap’, prosedur relatif lama, dan keharusan adanya jaminan.

Hasil studi itu cukup menarik untuk disimak, karena ternyata alasan utama UKM menerima kehadiran BMT bukanlah karena sistem syariahnya. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra ternyata belum terlalu memahami sistem syariah yang digunakan BMT. Sebanyak 61 responden (41 persen) menyatakan hanya tahu sedikit tentang sistem syariah, 71 responden (47 persen) menyatakan tidak tahu, dan hanya 18 (12 persen) yang menyatakan sudah tahu. Seiring dengan hasil Komisi Fatwa MUI dalam Rakernas, 14-16 Desember 2003, yang menyatakan bahwa: bunga bank haram, maka para praktisi keuangan syariah termasuk BMT diharapkan mampu melakukan terobosan baru, sehingga fatwa ini dapat menjadi stimulan bagi pengembangan BMT.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis grass root perlu secepatnya berbenah diri. *Pertama*, tidak semua nasabah BMT yang menjadi mitra karena alasan agama. Secara umum mereka tertarik karena adanya kemudahan layanan. Karenanya, sosialisasi sistem syariah yang mencakup konsep syariah dalam berekonomi, pengelolaan keuangan, konsep riba dan dampaknya, serta pemahaman terhadap produk-produk halal dan thayyib perlu diintensifkan, sehingga masyarakat merasakan keberkahan, keadilan dan keunggulan sistem syariah. *Kedua*, peningkatan kompetensi pengelola. Pengelola BMT merupakan ujung tombak dalam pemberdayaan nasabah. Oleh karenanya, para pengelola mesti memiliki kapasitas yang memadai, mulai dari pemahaman konsep sistem ekonomi syariah sampai pada teknis operasionalnya. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang mencakup aspek kemampuan teknis operasional dan manajemen. *Ketiga*, melakukan pembinaan intensif. Dalam pandangan Islam, hubungan ekonomi tidak sekedar masalah hutang piutang, namun lebih dari itu adalah adanya aspek pendidikan. BMT dapat melakukan transformasi sosial masyarakat dengan terus melakukan pembinaan terhadap para nasabahnya.

Pembinaan kepada nasabah meliputi dua aspek. *Pertama*, aspek bisnis, yaitu bagaimana supaya nasabah mampu meningkatkan kinerja usahanya. Selanjutnya, pengelola BMT bisa memfasilitasi antar-nasabah untuk saling bekerjasama, bermitra, dan saling membesarkan. Kendati jenis usaha nasabah ada yang sama, pengelola mesti mampu menyakinkan bahwa antar-mereka bukanlah pesaing, tetapi mitra. *Kedua*, aspek ruhi. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, aspek ruhi yang mencakup nilai-nilai ke-Islaman, menjadi sangat penting. Satu kilogram sayur misalnya, tidak akan ditimbang menjadi 9 ons. Kejujuran ini akan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan para konsumen.

Baiknya kinerja BMT akan memberikan image yang positif bagi pengembangan keuangan syariah, sehingga pilihan nasabah terhadap BMT tidak sekadar adanya kemudahan dalam prosedur, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, namun lebih dari itu yaitu sistemnya yang sesuai dengan syariah Islam. Kita berharap semoga BMT mampu meningkatkan kesejahteraan dan melahirkan pengusaha yang bermoral dan profesional.

G. Temuan di lapangan dan pembahasan

a. Profil koperasi pondok pesantren sidogiri

Pondok Pesantren agaknya bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan untuk mencetak generasi berprilaku islami, tetapi sekaligus mampu membuktikan diri sebagai lembaga perekonomian guna menyejahterakan santri serta masyarakat luas. Langkah tersebut telah dibuktikan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ponpes yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 263 tahun silam di Desa Sidogiri, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, itu bahkan berhasil mengembangkan konsep ekonomi syariah.

Satu pengurus Ponpes Sidogiri, Mahmud Ali Zain, menjelaskan kiprah ponpes tersebut di bidang ekonomi diawali keinginan untuk mandiri/tanpa mengharap bantuan pihak lain, dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha awal berupa kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren memenuhi kebutuhan para

santri. Koperasi Ponpes Sidogiri (Koppontren Sidogiri) terus berkembang, dengan menerapkan prinsip dari santri, oleh santri dan untuk santri. Artinya, modal koppontren dihimpun dari santri, dikelola oleh santri dan keuntungannya juga kembali ke santri.

Dalam perkembangannya, pengurus Koppontren Sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum Ponpes Sidogiri pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syariah bernama Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU). *“Usaha tersebut guna merespon keresahan masyarakat sekitar pesantren yang mulai terjerat praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentenir.”*

BMT-MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, aset maupun omzetnya. Saat ini omzet bisnis syariah mencapai Rp42 miliar per tahun. Adapun jumlah nasabahnya mencapai 12.000 orang lebih. Uni layanannya pun berkembang menjadi 12 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Pasuruan. Hal tersebut tergambar pada tabel jumlah asset tiga lembaga keuangan sebagai berikut:

Tahun	Kopontren	BMT-MMU	BMT-UGT
2006	16.374.845.563	26.783.517	30.314.153.975
2007	16.581.563.176	42.333.557.553	51.3.847.357.776
2008	19.675.089.280	68.104.139.196	62.828.547.669
2009	20.636.138.979	86.263.890.742	80.962.748.114

(Tabel 1. Jumlah asset dalam lima tahun dalam rupiah)

b. Sejarah singkat berdirinya BMT Sidogiri

Bermula dari Program P2KER Inisiasi PINBUK bersama Depkop, BMI (BANK MUAMALAH INDONESIA) dan Inkopontren (KONSORSIUM 4) BMT-MMU BMT-MMU (BMT Maslahah Mursalah lil Ummah) di Pesantren Sidogiri Pasuruan. Serta dari Program P2KER di Probolinggo berdirilah BMT-MMU pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1418 H atau 17

Juli 1997 dengan modal 13,5 juta. BMT-UGT BMT-UGT (BMT Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur. BMT-UGT mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Selama 5 tahun berjalan

c. Pengembangan Usaha BMT MMU dan BMT UGT Pon.Pes Sidogiri

Dengan memanfaatkan jaringan alumni dan guru Ponpes Sidogiri, maka para personil pondok pesantren tersebut lantas membentuk usaha gabungan terpadu (UGT) di Surabaya pada 2002. Menurut manajer BMT-UGT Sidogiri, Abdul Majid Umar, pendirian BMT-UGT dimaksudkan memperluas jaringan BMT Sidogiri ke luar wilayah Pasuruan. *“Berdasarkan ijin yang diberikan Dinas Koperasi Kab. Pasuruan, wilayah kerja BMT-MMU hanya sebatas Pasuruan. Agar lebih leluasa, kami mengajukan ijin mendirikan sejumlah BMT-UGT ke Dinas Koperasi & PKM Jatim supaya dapat beroperasi di semua wilayah di Jatim,”*

Sambutan masyarakat terhadap kehadiran BMT-UGT di Surabaya disebutkan cukup positif, dan kini berhasil menjaring 1.300 orang penabung dengan perputaran dana Rp4 miliar per bulan. Sebagian besar nasabahnya adalah pedagang besi rongsokan. *“Kami menekankan layanan yang adil, mudah dan masalah atau memberikan manfaat. Semisal pada produk pembiayaan jenis mudharabah atau bagi hasil, manajemen menerapkan pola bagi hasil 60% untuk peminjam modal dan sisanya untuk BMT-UGT,”* lanjut Abdul Majid.

BMT-UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: mudharabah/bagi hasil, musyarakah/penyertaan modal, murabahah/jual beli, bai’bitsamanil’ajil/jual beli dan qord al hasan/hutang. Produk lainnya adalah

tabungan yakni mudharabah umum, pendidikan, Idul Fitri, qurban, walimah, ziarah dan mudharabah berjangka atau deposito

Produk lain yang diandalkan BMT-UGT Sidogiri adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui cabang kantor Koperasi BMT-UGT setempat kepada santri yang tengah menempuh pendidikan. Menurut Abdul Majid, kini Koperasi BMT-UGT telah memiliki 39 unit layanan di seluruh kabupaten/kota di Jatim, dan pada 2010 ditargetkan bertambah menjadi 100 cabang. Omzetnya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada 2005 senilai Rp43 miliar naik menjadi Rp89 miliar pada 2006 dan tahun lalu tercapai Rp180 miliar lebih. Peningkatan omzet diikuti peningkatan aset yang tercatat Rp13 miliar pada 2005 lantas naik menjadi Rp30 miliar pada 2006 dan tahun lalu mencapai Rp51 miliar. Dengan didukung jaringan alumni Ponpes Sidogiri sebanyak 30.000 orang lebih, hingga akhir 2007 koperasi tersebut memiliki anggota 216 orang anggota biasa dan luar biasa ditambah 28.987 orang berstatus calon anggota

Dalam pengelolaan usaha pengasuh pondok pesantren sangat menekankan dengan istilah manajemen rasul, yaitu sebagaimana di sampaikan “ *Mahmud mengaku perkembangan BMT-UGT dan BMT-UMM hingga memperoleh kepercayaan masyarakat disebabkan menerapkan manajemen rasul yakni siddiq/jujur, amanah/dapat dipercaya dan fathonah/profesional. Kami percaya, alumni Ponpes Sidogiri masih memegang tiga prinsip itu, sehingga kami berpeluang terus berkembang*

H. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

1. Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah riil terjadi, karena motifasi awal dari perintisan dan berdirinya BMT di tengah

pondok pesantren dan masyarakat sekitar, memiliki kedekatan hubungan komunikasi yang erat dan saling menguntungkan. Keadaan ini diawali dari keprihatinan pengasuh pondok terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang berhungan dengan lembaga ekonomi non syariah yang lebih cenderung menerapkan bunga yang tinggi sehingga sangat memberatkan.

2. Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri merupakan bentuk kegiatan lembaga keuangan ekonomi mikro yang layak untuk di jadikan alternatif model untuk di kembangkan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah di masa yang akan datang. Ini terbukti dari antusiasme masyarakat yang memanfaatkan lembaga keuangan mikro ini karena lebih sesuai dengan keyakinannya, tranferan dan menyentuh langsung ke para pelaku di tingkat bawah.
3. Melihat jumlah perkembangan anggota, aset dan kiprahnya, lembaga keuangan mikro seperti BMT di pondok Sidogiri, sangat layak untuk di jadikan alternatif mitra dalam mengembangkan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di masyarakat .

b. Saran saran

1. Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah layak untuk di jadikan alternatif model pengembangan lembaga keuangan mikro yang patut untuk terus di kembangkan. Namun di butuhkan tambahan pengembangan dalam bidang SDM, manajemen, mentalitas pelaku usaha dengan prinsip pemisahan antara dana usaha dan pribadi serta perlu untuk di kembangkan bidang usaha mikro tetapi memiliki cakupan dari hulu sampai hilir. Ini sangat mungkin dilakukan karena banyak pelaku usaha yang bermitra dengan BMT adalah usaha dagang di tingkat agen dan

pengecer, namun belum banyak di tingkat produksi

I. Daftar Pustaka

- Al-Bary, M.D. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Cetakan Pertama. Target Press. Surabaya.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Hasan. 2004. *Ekonomi islam, Prinsip dasar dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra insania Pres.
- Chapra. M. Umer. 1999. *Islam dan tantangan ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya. Risalah Gusti.
- Handoko, Hani.T. 1999. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE. UGM.
- Karim. Adiwarmanto. A. 2001. *Ekonomi islam*. Jakarta. Gema Insani pres.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta. Prenada Media.
- Matz, A., Milton F. Usry, dan Lawrence H. Hammer. 1992. *Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian)*. Erlangga. Jakarta.
- Milles, B. dan A.M. Huberman 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama. UI Press. Jakarta.
- Muhammad, S. 1994. *Manajemen Strategik*. Edisi kedua. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Jogjakarta.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. (UPP) AMP. YKPN
- Muhammad. 2004. *Etika bisnis Islam..* Yogyakarta. (UPP) AMP. YKPN
- Nurgiantoro, N. 2004. *Statistik Terapan*. Cetakan Ketiga. UGM Press. Jogjakarta.
- Prianto, A. 2008. *Ekonomi Mikro*, Cetakan Pertama. Stara Press. Malang
- Priatna, D. dan Rony Setiawan. 2005. *Pengantar Statistik*. Cetakan pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ridwan. Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maalwattanwil (BMT) Yogyakarta UII pres*
- Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Robbins, S.P. 1999. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Gelora Aksara. Jakarta.
- Sabarguna, B.S. 2005. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. UI Press. Jakarta.
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik (Ed.). 2006. *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2005/2006*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Pasuruan.
- Sevilla, C.G. dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Edisi Pertama. UI Press. Jakarta.
- Suparjo, Edi.A. muna'I Ahamad. 2002. *Sistem pengendalian internal Koperasi BMT-MMU Pasuruan*. Cetakan pertama
- Soekartawi. 2000. *Agroindustri dalam Perspektif Sosial Ekonomi*. Cetakan Pertama. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekartawi. 2005. *Agrobisnis*. Cetakan Kedua. RajaGrafindo Persada. Jakarta.